

1

Latar Belakang

Krisis ekonomi global pada akhir 2007 mendorong lembaga-lembaga keuangan internasional, negara-negara maju dan berkembang mulai memikirkan untuk melakukan penataan ulang sistem keuangan global dan nasional agar lebih tahan menghadapi gejolak. Krisis tersebut juga telah mempercepat pergeseran kekuatan ekonomi dunia dimana peran China dan India menjadi semakin penting. Bersama-sama dengan Brazil, Korea, Mexico, Rusia dan Turki, China dan India menjelma menjadi kekuatan baru (EM7 – *Emerging Market-7*) dan penopang utama pertumbuhan ekonomi dunia menggantikan negara-negara G-7.

Selain krisis global, perekonomian dunia menghadapi fenomena kenaikan harga energi, krisis pangan dan perubahan iklim. Harga minyak mentah sempat mendekati US\$150 per barrel tahun lalu. Penggunaan bahan nabati sebagai sumber energi alternatif menyebabkan harga bahan pangan meningkat pesat dan menimbulkan ancaman krisis pangan bagi ratusan juta penduduk di negara-negara miskin.

Setelah meningkat tipis tahun lalu, arus Penanaman Modal Asing Langsung (PMAL) ke negara berkembang diperkirakan akan menurun drastis pada 2009 ini dan baru akan berangsur pulih dalam periode 2010-14. Agar dapat bersaing dalam menarik PMAL, negara-negara berkembang dituntut berbenah diri, memperkokoh pasar domestik, menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan menghadirkan kelengkapan infrastruktur untuk mengurangi biaya produksi tetap (*fixed cost*).

Perdagangan dunia akan segera pulih dan kawasan Asia diperkirakan akan pulih lebih cepat dari kawasan lain. Indonesia diperkirakan akan memperoleh manfaat positif dengan pemulihan ekonomi tersebut.

Dalam proses pemulihan dan sesudahnya Indonesia diperkirakan akan lebih menarik bagi investor asing karena: (1) jumlah penduduk besar; (2) tersedia angkatan kerja dengan moproduktivitas yang masih dapat ditingkatkan; (3) tersedia bahan baku; (4) stabilitas politik dan ruang bagi penerapan mekanisme pasar semakin luas; dan (5) biaya yang tak terkait langsung dengan kegiatan ekonomi makin kecil (*clean government* atau *good corporate governance*).

Dengan ketentuan *rule of origin* di ASEAN Indonesia akan menjadi lokasi menarik bagi investor dari negara di luar ASEAN yang akan memanfaatkan sumber daya di Indonesia untuk pemasaran di negara-negara ASEAN maupun di luar Asean. Indonesia perlu memberi peluang bagi investor untuk memanfaatkan “kelebihan” ini. Sikap keterbukaan masyarakat perlu dikembangkan agar investor asing merasakan bahwa risiko berusaha di Indonesia semakin rendah.

Indonesia merupakan salah satu di Asia yang tetap menikmati pertumbuhan positif di tengah krisis global. Keterkaitan finansial dan perdagangan yang rendah dengan Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya membuat perekonomian kita tidak terlalu rentan terhadap krisis global. Seluruh sektor perekonomian praktis lebih mengandalkan pada pasar domestik ketimbang pasar luar negeri.

Sejak krisis 1998, sektor perbankan terus melakukan konsolidasi sehingga indikator-indikator kesehatan perbankan Indonesia lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara tetangga. Perekonomian Indonesia juga diuntungkan oleh kemerosotan tajam perekonomian negara-negara berkembang lainnya, sehingga secara relatif posisi daya saing kita terdongkrak. Nisbah utang terhadap PDB terus turun dan menyisakan ruang gerak fiskal untuk melakukan ekspansi, termasuk pengguliran program stimulus.

2

Road Map 2010-2014

Visi

Road map pembangunan 2010-2014 disusun berdasarkan visi pembangunan ekonomi jangka panjang yang bertujuan “Mewujudkan negara maritim yang mampu mengintegrasikan perekonomian domestik menuju negara maju yang berkeadilan”.

Misi

Visi pembangunan jangka panjang di atas dijabarkan dengan indikator yang lebih terukur berupa tiga misi berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan;
2. Perluasan penyerapan tenaga kerja; dan
3. Pengentasan penduduk miskin dan pemerataan pembangunan.

Sasaran Strategis

Visi dan misi pembangunan di atas dapat terwujud melalui pencapaian lima sasaran strategis berikut:

1. Struktur ekonomi yang kokoh, mandiri dan berdaya saing;
2. Sumber daya manusia (SDM) produktif;
3. Sumber pembiayaan pembangunan mencukupi dan efisien;
4. Birokrasi yang kompeten, efektif dan bersih; dan
5. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara optimal dan lestari.

Road map 2010-2014

Road map pembangunan ekonomi 2010-2014 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sektoral dan usulan kebijakan strategis untuk mencapai target tersebut. Penjabaran sasaran-

Target pertumbuhan ekonomi 2010-2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian	3,9	3,6	3,8	4,0	4,1	4,2
Pertambangan	1,5	1,6	2,3	2,7	2,2	2,0
Industri manufaktur	2,6	3,9	4,8	5,5	6,3	6,5
Utilitas	11,2	11,2	11,5	11,7	11,7	11,4
Konstruksi	6,4	6,9	7,5	7,5	7,3	7,1
Perdagangan & hospitalitas	2,3	5,7	6,6	7,3	7,6	7,4
Transport & komunikasi	16,5	16,6	15,6	17,7	16,7	16,3
Keuangan	6,2	6,9	7,5	7,6	7,5	6,9
Jasa-jasa	6,6	6,5	6,6	6,6	6,6	6,3
Total PDB	4,8	5,9	6,5	7,2	7,4	7,4

Sumber: Proyeksi Kadin, 2009.

sasaran strategis diuraikan pada Bagian 3 dan area kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut diuraikan pada Bagian 4.

Secara alamiah perekonomian Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh rata-rata 6,3% selama kurun waktu 2010-14. Dengan modal politik lebih baik daripada lima tahun lalu dan prospek pemulihan ekonomi dunia menunjukkan tanda-tanda cukup menggembirakan, terbuka ruang bagi

pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,9%. Target pertumbuhan ekonomi 2010-2014 disajikan pada Tabel.

Secara skematis kerangka strategi pembangunan berupa visi, misi, sasaran dan area kebijakan dapat digambarkan pada skema berikut ini.



3

Sasaran strategis

Visi dan misi pembangunan ekonomi seperti diuraikan pada Bagian 2 diwujudkan melalui pencapaian 5 (lima) sasaran strategis, meliputi: struktur perekonomian, kualitas sumber daya manusia (SDM), pembiayaan pembangunan, birokrasi pemerintahan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).

1. Struktur perekonomian yang kokoh, mandiri dan berdaya saing

Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan dapat dicapai apabila perekonomian didukung oleh landasan yang kokoh, ditopang oleh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berinteraksi dengan pasar luar negeri (*traded sectors*), terutama pertanian dan industri manufaktur. Mengingat perannya yang besar pada penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa dan kemandirian ekonomi, sektor pertanian dan industri manufaktur perlu diupayakan menjadi tulang punggung perekonomian. Diperlukan peran aktif pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut.

Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian: tersedia tanah yang subur dengan luasan besar, curah hujan cukup dan iklim yang sesuai bagi pertumbuhan berbagai jenis tanaman dan cocok bagi pembudidayaan ikan. Karena sebagian besar penduduk berusaha di sektor pertanian, pertumbuhan sektor pertanian akan meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk dan mendorong pemerataan pendapatan antardaerah dan antarpenduduk. Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian akan memperkuat perekonomian melalui peningkatan ketersediaan pangan bagi penduduk.

Kenaikan harga pangan di pasar dunia seyogyanya dimanfaatkan bagi peningkatan produksi dan penghasilan petani. Kendala produksi perlu diminimalkan dan akses produsen ke pasar perlu dibuka seluas-luasnya. Hambatan ekspor pangan seyogyanya dihindari karena dapat menghapus insentif peningkatan produksi dan menghambat pertumbuhan pasokan pangan dalam jangka panjang.

Sejak krisis ekonomi 1998, sektor industri manufaktur tumbuh terseok-seok. Pertumbuhan industri manufaktur terhambat oleh berbagai persoalan yang sudah lama ada tetapi hingga kini belum juga terselesaikan. Persoalan-persoalan tersebut pada umumnya bersifat generik, berpengaruh terhadap efisiensi dan daya saing perekonomian secara umum. Karena industri manufaktur merupakan *traded sector*, penurunan daya saing sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Peningkatan lapangan kerja, penerimaan devisa dan kemandirian ekonomi terhambat karena pertumbuhan industri manufaktur yang rendah.

Mendorong pertumbuhan *traded sectors* bukan berarti menghambat pertumbuhan *non-traded sectors* (sektor-sektor yang tidak terkait dengan pasar luar negeri seperti sektor

jasa-jasa). Pertumbuhan sektor *non-traded* seyogyanya mendukung pertumbuhan sektor *traded*. Pertumbuhan sektor jasa keuangan, misalnya, seyogyanya dapat meningkatkan pasokan dana investasi ke sektor produktif. Agar dapat berperan secara optimal sektor keuangan harus sehat dan efisien. Sektor keuangan yang tidak sehat dan tidak efisien mendorong penempatan dana yang bersifat spekulatif dan kelangkaan dana investasi bagi sektor riil.

2. Sumber daya manusia produktif

Sumber daya manusia yang handal merupakan unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi sasaran strategis pembangunan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa lebih disebabkan kualitas manusianya daripada kekayaan sumber daya alam, panjang-pendeknya sejarah, atau ukuran wilayah negara.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kebijakan pendidikan yang berorientasi pada output harus menjadi bagian dari kerangka strategi pembangunan secara keseluruhan. Orientasi pada output sudah waktunya dilakukan, karena dalam soal input (jumlah gedung sekolah, rasio guru-murid, dan sebagainya) Indonesia tidak kalah dari negara-negara lain; namun dalam soal output, seperti penguasaan bahasa dan kecakapan matematika para siswa dan kemampuan penyelesaian masalah (*problem solving*), kita ternyata masih tertinggal.

Unsur yang saling terkait dan bersejajaran bahu membahu dengan kebijakan pendidikan adalah kebijakan di bidang kesehatan. Indonesia mutlak memerlukan suatu sistem pendanaan kesehatan secara berkelanjutan dan terencana, untuk meningkatkan akses semua warga terhadap pelayanan kesehatan. Hanya orang-orang yang sehat yang dapat belajar, bekerja dan berkontribusi secara optimal bagi keberhasilan pembangunan.

3. Sumber pembiayaan pembangunan mencukupi dan efisien

Mengacu kepada target pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6,3 - 6,9 persen per tahun selama 2010-2014, kebutuhan dana investasi rata-rata per tahun pada 2010–2014 mencapai Rp2.855 triliun hingga Rp2.910 triliun. Dana yang dapat disediakan pemerintah melalui APBN diperkirakan hanya sekitar sekitar 13% saja, dan 87% sisanya harus dihimpun dari swasta domestik (bank, nonbank, dan pasar modal) dan swasta asing dalam bentuk pinjaman dan investasi langsung.

Kebutuhan dana yang besar tersebut perlu ditopang oleh kapasitas pendanaan yang memadai di dalam negeri. Peran sektor keuangan domestik (perbankan dan pasar modal) sampai saat ini masih sangat rendah, relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal yang sama juga terjadi untuk penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment/FDI*).

Selain itu, sebagian besar dana perbankan bersifat jangka pendek dan dana jangka panjang diperoleh dari pasar modal. Tingkat tertinggi dari kapitalisasi pasar saham dan obligasi di Indonesia terhadap PDB adalah 50% pada 2004, namun turun menjadi 34% pada 2008. Di

tengah keterbatasan sumber dana domestik, pemanfaatan dana yang ada juga belum optimal dan fungsi intermediasi sektor keuangan ke sektor riil masih terkendala. Hal ini tercermin pada besarnya aset perbankan dalam bentuk obligasi pemerintah dan SBI. Separuh obligasi pemerintah dipegang oleh perbankan, sementara jumlah dana perbankan yang dialokasikan ke SBI terus meningkat hingga Rp225 triliun (97% dari total SBI) pada bulan Juni 2009, dari Rp96,5 triliun (55% dari SBI) pada bulan Juli 2008. Kondisi ini mengurangi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor riil. Masalah lain yang mengemuka adalah penyebaran likuiditas perbankan yang timpang.

Pinjaman dan investasi dari luar negeri tidak bisa dihindari. Namun harus disadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir investasi asing masuk ke Indonesia belum mampu menggerakkan sektor riil. Hal ini disebabkan antara lain karena dana asing yang masuk ke Indonesia sebagian besar dalam bentuk investasi portofolio (obligasi pemerintah dan saham). Sementara itu investasi asing langsung seringkali terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit dan pertentangan antara pusat dan daerah.

Untuk lebih meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, baik bagi kebutuhan investasi publik maupun peningkatan peran negara dalam pelayanan publik maupun belanja sosial, maka tak ada pilihan kecuali meningkatkan tax ratio dari aras dewasa ini sekitar 12 persen dari PDB menjadi setidaknya 15 persen pada tahun 2014.

4. Birokrasi yang kompeten, efektif dan bersih

Di tengah perubahan mendasar yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, birokrasi kita tampaknya yang masih belum banyak menunjukkan perubahan berarti. Bahkan di sana-sini tampak “kedodoran” mencari format barunya. Seluruh kewenangan, kecuali di lima bidang, telah diserahkan kepada pemerintah daerah tetapi postur birokrasi di pusat tidak semakin ramping. Jabatan eselon I kian bertambah dan eselon-eselon di bawahnya membengkak. Lingkup dan karakteristik tugas dan kewenangan pusat selayaknya berkurang sejalan dengan otonomi daerah. Pusat lebih fokus pada perumusan kebijakan, sehingga posisi dan jabatan pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan teknis terus berkurang.

Pembengkakan birokrasi di pusat menimbulkan komplikasi serius, tumpang-tindih, dan tuntutan koordinasi semakin pelik. Adanya lembaga negara yang bersifat independen sepatutnya juga mendorong pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan reposisi kementerian dan lembaga negara yang ada sebelumnya.

Jumlah kementerian di Indonesia tergolong yang paling banyak, dibandingkan dengan negara-negara besar sekalipun, dengan beragam ideologi yang dianutnya. Tanpa pembenahan mendasar, efektivitas pemerintahan diperkirakan tetap rendah seperti terlihat dari Indeks Keefektifan Pemerintah (*Government Effectiveness Index*).¹ Indonesia bertengger di zona negatif, yang secara harfiah dapat ditafsirkan bahwa pemerintah lebih banyak “menggangu” ketimbang “membantu.” negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki indeks jauh lebih baik dari Indonesia. Semua negara tersebut memiliki indeks yang

¹ Indeks ini mengukur kualitas pelayanan publik, kapasitas birokrasi dan independensinya terhadap tekanan politik, dan kualitas perumusan kebijakan.

berada di zona positif sementara Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam, Bangladesh, Cambodia, Laos, Bolivia, Venezuela, Timor-Leste, dan Myanmar.

Memerhatikan kondisi tersebut, peningkatan kualitas birokrasi selayaknya mendapat perhatian. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan birokrasi yang kompeten, efektif dan bersih (tidak korup). Selama lima tahun mendatang indeks efektifitas pemerintah diharapkan dapat ditingkatkan minimal berada di zona positif.

5. SDA dikelola secara optimal dan lestari

Sumber daya alam (SDA) merupakan anugerah yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Investasi besar dan teknologi tinggi yang diperlukan dalam ekstraksi SDA seyogyanya tidak menjadi hambatan bagi pemanfaatan SDA secara optimal. Investasi asing harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan pemanfaatan SDA seraya meningkatkan kemampuan sendiri bagi pemanfaatan SDA di masa depan.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan SDA perlu dikelola secara efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kepemilikan SDA tentu tetap berada di tangan negara tetapi pemanfaatannya dapat dilakukan oleh swasta, baik dalam negeri maupun asing. Untuk memperoleh manfaat maksimal, diperlukan transparansi pengelolaan dan mekanisme pembagian hasil yang adil. Untuk meningkatkan sumber pembiayaan investasi yang diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, monetisasi atas kekayaan alam yang dimiliki tidak perlu dianggap tabu.

~oo0oo~

4

Area Kebijakan

Untuk mencapai lima sasaran strategis di atas diperlukan serangkaian kebijakan yang berhubungan dengan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), teknologi, pasar modal dan perbankan, pasar barang, pasar tenaga kerja. Selain itu pemerintah melakukan kebijakan prioritas misalnya untuk mendorong kegiatan usaha tertentu yang dipandang potensial dan strategis, mempengaruhi komposisi perekonomian menurut jenis pelaku usaha dan memperluas persebaran kegiatan ekonomi antar daerah.

1. Infrastruktur

Tidak memadainya infrastuktur disebabkan oleh tiga faktor: kurangnya alokasi anggaran, penggunaan yang tidak optimal atas anggaran yang ada, serta koordinasi yang buruk antara yurisdiksi. Sayangnya, partisipasi swasta juga masih kurang. Pihak swasta tidak banyak terlibat dalam proyek-proyek infrastuktur karena sektor perbankan domestik enggan menyalurkan kredit ke sektor tersebut, implementasi dari kebijakan infrastruktur tidak efektif, serta banyak proyek infrastruktur harus beroperasi di bawah kondisi pasar: jasa infrastruktur kebanyakan harus dijual pada harga jauh di bawah biaya pengadaannya.

Untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan penyediaan infrastruktur yang handal (infrastruktur fisik dan fisik) mutlak diperlukan.

Untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan pemberian insentif insentif yang memadai berupa keringanan pajak, bea masuk dan kemudahan proses perizinan.

Kebijakan harga infrastruktur perlu ditinjau kembali.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berkualitas mutlak diperlukan bagi peningkatan efisiensi produksi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan kualitas SDM meliputi peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Upaya membangun kualitas SDM difokuskan pada (1) peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan akses semua penduduk pada pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan (2) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan khususnya jasa pendidikan yang disediakan oleh negara.

- Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, diperlukan sistem pendanaan berkelanjutan dan terencana. Dengan demikian masyarakat (penduduk miskin) tidak perlu lagi khawatir terhadap ketidakpastian pendanaan bagi

- Kualitas pelayanan pendidikan sudah semestinya ditingkatkan dan dievaluasi perkembangannya. Paradigma dalam pembangunan pendidikan yang berlaku selama itu sudah semestinya diubah. Capaian pembangunan pendidikan seyogyanya mengacu kepada hasil pendidikan berupa prestasi peserta didik.

3. Teknologi

Teknologi merupakan faktor penting untuk menopang kemajuan perekonomian. Salah satu penentu produktivitas adalah tingkat teknologi. Sementara itu kemampuan teknologi sangat ditentukan oleh kegiatan riset dan pengembangan. Selama ini dana R&D sangat rendah dan sebagian besar dari sektor publik (pemerintah).

Untuk meningkat teknologi produksi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan pemerintah perlu fokus kepada kebijakan berikut.

- Peningkatan anggaran dan efisiensi alokasi anggaran negara untuk penelitian;
- Pemberian insentif dalam bentuk keringan pajak dan lain-lain, bagi kegiatan R&D swasta

4. Perbankan dan pasar modal

Industri keuangan di Indonesia didominasi oleh perbankan. Peranan lembaga keuangan non bank sangat kecil dibandingkan dengan perbankan. Dominasi perbankan terlalu besar di sektor keuangan menyebabkan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI Rate) tidak diikuti oleh penurunan suku bunga kredit.

Pasar modal dan lembaga keuangan nonbank dapat berperan lebih besar dalam mengurangi dominasi perbankan. Pasar modal diperlukan untuk menarik dana dari dalam dan luar negeri, dalam kapasitas besar, yang langsung dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya pada sektor riil. Sementara itu, peranan lembaga keuangan non bank lebih kepada jangkauannya kepada masyarakat kecil di daerah yang tidak terjangkau oleh perbankan.

Kebijakan di sektor perbankan dan pasar modal seyogyanya diarahkan untuk meningkatkan pasokan dana investasi dengan harga yang lebih kompetitif. Fokus kebijakan diupayakan untuk meningkatkan penyaluran kredit oleh perbankan, peningkatan peran lembaga keuangan non-bank dan pasar modal dalam mobilisasi dana dan menyalurkannya ke sektor produktif dan mendorong penggunaan surplus dana masyarakat untuk kegiatan usaha.

Untuk jangka satu-dua tahun ke depan, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- Jika kondisi likuiditas bank-bank kecil tidak membaik, maka perlu ada program penjaminan pinjaman antarbank agar likuiditas lebih merata dan sekaligus bisa menurunkan suku bunga pinjaman. Untuk menghindari *moral hazard* maka bank yang menerima penjaminan diharuskan menaruh sebagian dana kas di pemerintah.

- Mengurangi persaingan dalam pencarian dana antara pemerintah dan swasta untuk meminimalisasikan efek pendesakan (*crowding-out effect*).
- Memberikan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit kepada sektor UKM dan infrastruktur.
- Agar kebutuhan dana pemerintah dari publik tidak terus menggelembung, pemerintah perlu lebih tekun melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak, dengan mengutamakan peningkatan kepatuhan membayar pajak. Hanya dengan peningkatan tax ratio, pemerintah bisa mengurangi penetrasinya dalam penghimpunan dana publik.

Dalam jangka menengah, perlu dipersiapkan langkah-langkah berikut:

- Menyempurnakan arsitektur perbankan Indonesia agar peranan perbankan sejalan dengan upaya penguatan sektor riil dan peningkatan mobilisasi dana masyarakat seluas-luasnya.
- Mendinamiskan peranan lembaga-lembaga keuangan nonbank dan optimalisasi pasar modal yang transparan dan kredibel.
- Mobilisasi dana haji.
- Monetisasi aset-aset negara.

5. Pasar barang

Kompetisi merupakan kunci bagi peningkatan efisiensi perekonomian. Untuk itu perlu terus dikembangkan kompetisi yang sehat di pasar barang. Dalam lima tahun ke depan fokus kebijakan di pasar diarahkan pada upaya berikut.

- Mendorong efisiensi distribusi barang (dari produsen ke konsumen).
- Memperkecil disparitas harga antardaerah sekaligus menekan laju inflasi secara berkelanjutan.
- Perlindungan wajar bagi usaha domestik atas persaingan tidak adil dengan produk impor.

6. Pasar tenaga kerja

Fokus kebijakan di pasar tenaga kerja diarahkan untuk mencari solusi bagi banyak keluhan baik dari produsen (majikan) maupun pekerja. UU ketenagakerjaan yang berlaku selama ini dipandang oleh perusahaan tidak fleksible. Sebaliknya pekerja menganggap UU tersebut kurang melindungi pekerja. Memerhatikan masalah tersebut, penyempurnaan UU ketenagakerjaan perlu mendapat prioritas.

Perbaikan UU dan peraturan ketenagakerjaan perlu pula diarahkan untuk mendorong perluasan lapangan kerja di sektor formal. Ketentuan kaku mengenai hubungan buruh-majikan menyebabkan majikan menghindari ikatan formal dengan pekerjanya.

Jaminan sosial bagi pekerja perlu lebih mendapat perhatian dengan menerapkan Sistem Jaminan Sosial bagi pekerja sesuai dengan anaman UU SJSN.

7. Prioritisasi

Untuk kegiatan usaha yang bersifat strategis dan potensial pemerintah perlu menerapkan perlakuan khusus. Upaya tersebut diperlukan misalnya untuk membantu usaha kecil berkembang lebih cepat sehingga “naik kelas” menjadi menengah dan besar. Persebaran kegiatan usaha diupayakan menjadi lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan berikut ini diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut.

- *Active industrial policy* untuk mendorong pertumbuhan kegiatan usaha yang dianggap potensial atau bersifat strategis;

- Mendorong perubahan komposisi pelaku usaha sehingga persentase usaha menengah menjadi semakin besar dengan mendorong usaha kecil tumbuh menjadi lebih besar.
- Mendorong persebaran spasial kegiatan usaha menjadi lebih merata.